

20 s.d 22 MARET 2023



LAPORAN PERJALANAN DINAS

- 1. HAMRANSYAH, SH**
- 2. BASRI M., S.AP**
- 3. EDWIN SANTOSO**
- 4. INDRA PARDIAN, S.IP**
- 5. Hj. DIAN YUNIARTI, S.Sos**
- 6. ARLINA, S.Hut**
- 7. RAHMADI, SE**
- 8. MUHAMAD SALEH, ST**
- 9. AHMAD RAFI'I, ST**

**Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pansus
Raperda I DPRD Kabupaten Paser Ke Badan
Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda**

LAPORAN PERJALANAN DINAS

A. DASAR

Dasar perjalanan dinas :

1. Banmus Nomor 4 Tahun 2023, tanggal 1 Maret 2023
2. Surat Tugas No : 090.1 / / P.J. D / DPRD / III / 2023

B. YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS

Dalam perjalanan dinas ini yang melaksanakan perjalanan dinas adalah :

1. Nama : Hamransyah, SH
Jabatan : Ketua Pansus Raperda I DPRD Paser
2. Nama : Basri M., S.AP
Jabatan : Wakil Ketua Pansus Raperda I DPRD Paser
3. Nama : Edwin Santoso
Jabatan : Sekretaris Pansus Raperda I DPRD Paser
4. Nama : Indra Pardian, S.IP
Jabatan : Anggota Pansus Raperda I DPRD Paser
5. Nama : Hj. Dian Yuniarti, S.Sos
Jabatan : Anggota Pansus Raperda I DPRD Paser
6. Nama : Arlina, S.Hut
Jabatan : Anggota Pansus Raperda I DPRD Paser
7. Nama : Rahmadi, SE
Jabatan : Anggota Pansus Raperda I DPRD Paser
8. Nama : Muhamad Saleh, ST
Jabatan : Anggota Pansus Raperda I DPRD Paser
9. Nama : Ahmad Rafi'i, ST
Jabatan : Anggota Pansus Raperda I DPRD Paser

C. TUJUAN PERJALANAN DINAS

Kunjungan Kerja Pansus Raperda I DPRD Kabupaten Paser Ke Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda.

D. Waktu dan Tempat

1. Tujuan : Bapenda Prov. Kaltim
2. Waktu Perjalanan : 3 (Tiga) Hari
3. Berangkat Tanggal : 20 Maret 2023
4. Kembali Tanggal : 22 Maret 2023

E. KESIMPULAN / HASIL

Samarinda. Pansus Raperda 1 DPRD Kab. Paser mengunjungi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menggali informasi, berkonsultasi serta bertukar referensi terkait pembuatan draf Raperda yang berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB), Selasa (21/03/2023).

Rombongan pansus raperda 1 DPRD Kab. Paser diterima oleh Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah Bapenda Prov. Kaltim Taupik Rahman, S.Sos., MM didampingi oleh Kasubbid. PKB dan BBNKB Muhammad Ansori, SE dan Kasubbid. Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Julianti Mutiara John, SE., MM.

Hamransyah sebagai Ketua Pansus menyampaikan bahwa DPRD Paser dalam hal ini tim pansus raperda 1 ingin berlari dan bergerak cepat setelah personalia tim pansus ini dibentuk agar apa yang kita inginkan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah bisa segera diselesaikan dan terlaksana dengan baik serta kedepan Raperda ini setelah kita sahkan menjadi Perda bisa segera kita sosialisasikan kepada masyarakat.

"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah diamanatkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan membutuhkan pengaturan hukum yang harus dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan (legal aspect) berupa Perda yang memiliki nilai yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis", ujar Hamransyah.

Anggota Pansus 1, Muhamad Saleh juga mengometari terkait dengan banyaknya kendaraan bernomor polisi luar daerah Paser atau Kaltim baik itu kendaraan umum maupun alat berat yang berdampak pada banyak hal terkait dengan pendapatan pajak serta PAD yang berasal dari Pajak dan retribusi daerah menjadi perhatian bagi pansus 1.

"Diperlukan pengaturan khusus untuk mengatasi hal tersebut terkait dengan plat kendaraan luar daerah paser atau kaltim serta kendaraan alat berat", Kata Saleh.

Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah Bapenda Prov. Kaltim Taupik Rahman menjelaskan bahwa Pihak Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Prov. Kaltim pada saat ini juga sedang dalam pembahasan raperda PDRD yang telah melaksanakan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan arahan sebelum bergerak lebih jauh mengingat dalam pembahasan dinilai cukup rumit, maka diperlukan arahan guna membahas pasal per pasal.

Sejumlah masukan juga telah ditanggapi oleh Kemendagri, namun ada beberapa masukan yang menjadi perhatian bagi Kemendagri untuk ditampung agar bisa ditindaklanjuti kedepannya.

Sementara itu dalam pertemuan berikutnya di Kementerian Keuangan RI Ditjen Perimbangan juga mencari masukan untuk mendapatkan sejumlah keterangan terkait UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD salah satunya yang mengatur pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.

“Dari hasil pembahasan kita tidak boleh melenceng dari pakem (aturan) yang telah ada. Menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terkait dana bagi hasil yang sedang dibahas dan belum terbit,” kata Taupik menerangkan.

Dari pertemuan di Kementerian Keuangan, Kaltim juga diperkenalkan apabila ada beberapa potensi retribusi yang bisa dilakukan yang terpenting sesuai kewenangan dan pelayanan.

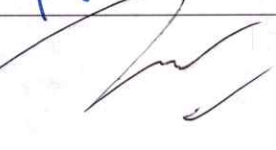
“Nanti dengan adanya itu kita dorong perubahan PP ataupun lampiran. Tentu masing-masing daerah pasti berbeda. Seperti di Kaltim pajak alat berat, khusus untuk provinsi. Ini kemudian berkaitan dengan bagaimana proses pemajakan alat berat, antara daerah ke daerah. Misal beroperasinya di Kaltim, namun fakturnya dari Jakarta, seperti apa teknis serta tahapannya, namun demikian setidaknya kita telah mengetahui gambarannya. Yang harus kita tahu dan perhatikan adalah seperti dampaknya di wilayah operasi.

“Bukan hanya soal kendaraan ada dimana, namun dampak kuota bbm, mengurangi pajak daerah BBNKB dan sebagainya. Sehingga ini harus diisinerigikan dan dikorelasikan dengan instansi terkait,” Sambung Taupik.

PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 24 Maret 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hamransyah, SH	Wakil Ketua DPRD Kab. Paser	
2	Basri M., S.AP	Wakil Ketua Pansus 1 Raperda DPRD Kab. Paser	
3	Edwin Santoso	Sekretaris Pansus 1 Raperda DPRD Kab. Paser	
4	Indra Pardian, S.IP	Anggota Pansus 1 Raperda DPRD Kab. Paser	
5	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Anggota Pansus 1 Raperda DPRD Kab. Paser	
6	Arlina, S.Hut	Anggota Pansus 1 Raperda DPRD Kab. Paser	
7	Rahmadi, SE	Anggota Pansus 1 Raperda DPRD Kab. Paser	
8	Muhamad Saleh, ST	Anggota Pansus 1 Raperda DPRD Kab. Paser	
9	Ahmad Rafi'i, ST	Anggota Pansus 1 Raperda DPRD Kab. Paser	

Dokumentasi Kunjungan Kerja Pansus Raperda I DPRD Kabupaten Paser Ke Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

